

STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI NASIONAL GUNA MENGHADAPI GEOPOLITIK INDO-PASIFIK

Prasetyawan¹, Lukman Yudho Prakoso², Ansori

^{1,2} Universitas Pertahanan RI, Bogor, Indonesia

*Email: prasetyawan@sp.idu.ac.id, kamalekumdeplek@gmail.com², Ansori@idu.ac.id

*Corresponding Author

Article Info Article history: Received: 27 July 2026 Revised: 27 July 2026 Accepted: 27 July 2026 Kata Kunci: Strategi pertahanan laut, ketahanan energi, keamanan maritim, geopolitik Indo-Pasifik, Sea Lines of Communication (SLOC).	ABSTRAK Dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah meningkatkan kompleksitas ancaman terhadap keamanan maritim, khususnya terhadap jalur distribusi energi, infrastruktur strategis, dan kepentingan nasional di laut. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional yang sangat bergantung pada keamanan jalur pelayaran dan stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pertahanan laut dalam memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar keamanan maritim di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan maritim, dan energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan strategi pertahanan laut tidak semata ditentukan oleh modernisasi alutsista, melainkan juga oleh peningkatan kesadaran <i>domain maritim</i> (<i>Maritime Domain Awareness</i>), pengamanan <i>Sea Lines of Communication</i> (SLOC), perlindungan objek vital nasional dan infrastruktur energi lepas pantai, interoperabilitas antarlembaga, serta penguatan kerja sama pertahanan regional. Sinergi antara kebijakan pertahanan, keamanan maritim, dan ketahanan energi menjadi faktor utama dalam menjamin keberlangsungan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pertahanan laut yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional merupakan prasyarat untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat gravitasi kompetisi geopolitik dunia. Meningkatnya rivalitas antara negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, memengaruhi stabilitas keamanan kawasan, termasuk keamanan maritim yang menjadi jalur utama perdagangan dan distribusi energi global. Sekitar 80% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut, sementara sebagian besar pasokan minyak dan gas alam menuju kawasan Asia Timur melewati *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang melintasi Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai ruang strategis yang rentan terhadap ancaman keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional (Paszak, 2021).

Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat penting karena berada pada persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta diapit oleh Benua Asia dan Australia. Posisi tersebut memberikan keuntungan strategis sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam menjaga keamanan wilayah laut nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional sekaligus bagian dari rantai pasok energi global (Listiyono et al., 2021).



Gambar 1. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Ketahanan energi merupakan salah satu dimensi penting dalam ketahanan nasional karena berkaitan dengan kemampuan negara menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat maupun sektor industri. Meskipun Indonesia merupakan negara penghasil energi, kebutuhan energi nasional masih dipenuhi melalui impor minyak mentah maupun bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan, sejalan dengan proyeksi permintaan energi kawasan Asia yang terus meningkat (Sopali, 2025). Ketergantungan tersebut menjadikan keamanan jalur pelayaran sebagai faktor penentu kontinuitas distribusi energi, karena gangguan akibat konflik geopolitik, pembajakan, terorisme maritim, sabotase infrastruktur energi, maupun bencana alam berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi nasional (Kuntjoro et al., 2021).

Dalam perspektif pertahanan negara, laut tidak lagi dipandang sekadar batas teritorial, melainkan ruang strategis yang harus dikelola dan diamankan untuk melindungi kepentingan nasional. Gagasan klasik tentang penguasaan laut sebagai basis kekuatan nasional tetap relevan untuk menjelaskan mengapa pembangunan kekuatan pertahanan laut Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan tempur, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan maritim, interoperabilitas antarlembaga, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan kerja sama pertahanan dengan negara mitra (Sarjito, 2025).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat keamanan maritim, antara lain Kebijakan Kelautan Indonesia, konsep Poros Maritim Dunia, serta pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) yang kini bertransformasi menuju kekuatan pertahanan yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman (Simatupang et al.,

2023). Kebijakan tersebut memerlukan penajaman lebih lanjut agar sejalan dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara terkini, mengingat perubahan lingkungan strategis Indo-Pasifik menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan kebijakan pertahanan laut dengan kebijakan ketahanan energi nasional (Dao, 2024).

Kajian mengenai keterkaitan antara pertahanan laut dan ketahanan energi masih relatif terbatas di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas strategi pertahanan maritim atau ketahanan energi secara terpisah, sehingga keterkaitan keduanya sebagai satu kesatuan strategi belum banyak dieksplorasi. Padahal keamanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan negara melindungi jalur distribusi energi, infrastruktur strategis, dan kepentingan nasional di laut. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya kajian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: *pertama*, bagaimana dinamika geopolitik Indo-Pasifik memengaruhi keamanan maritim Indonesia; *kedua*, bagaimana ancaman terhadap keamanan maritim tersebut berdampak pada ketahanan energi nasional; dan *ketiga*, bagaimana strategi pertahanan laut yang efektif dapat dirumuskan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar keamanan maritim Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji strategi pertahanan laut dalam memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar keamanan maritim di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena strategis yang dipengaruhi oleh faktor politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi, serta relasi antaraktor pada tingkat nasional maupun regional. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber sekunder yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, doktrin pertahanan, laporan organisasi internasional, artikel pada jurnal bereputasi, buku referensi, serta laporan lembaga penelitian yang membahas pertahanan laut, keamanan maritim, ketahanan energi, dan dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Dokumen kebijakan yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Kebijakan Umum Pertahanan Negara, serta Kebijakan Kelautan Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dilanjutkan dengan seleksi sumber berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kemutakhiran, sehingga data yang digunakan mampu menggambarkan perkembangan terkini keamanan maritim dan ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (*policy analysis*), meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi hubungan antarvariabel, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis difokuskan pada tiga aspek: (1) dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang memengaruhi keamanan maritim Indonesia; (2) tantangan terhadap ketahanan energi nasional yang bersumber dari ancaman terhadap jalur pelayaran, infrastruktur energi,

dan aktivitas maritim; serta (3) strategi pertahanan laut yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerangka analisis dibangun berdasarkan keterkaitan antara geopolitik Indo-Pasifik, strategi pertahanan laut, keamanan maritim, dan ketahanan energi nasional, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Dinamika geopolitik diposisikan sebagai faktor eksternal yang membentuk lingkungan strategis Indonesia dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan maritim, yang pada gilirannya berdampak pada keberlangsungan distribusi energi nasional. Strategi pertahanan laut berperan sebagai instrumen negara untuk menjaga keamanan *Sea Lines of Communication* (SLOC), melindungi objek vital nasional dan infrastruktur energi, serta meningkatkan daya tangkal melalui modernisasi kekuatan pertahanan dan sinergi antarlembaga.

Table 1 Variabel dan indikator penelitian strategi pertahanan laut dalam memperkuat ketahanan energi nasional

Variabel	Indikator
Dinamika Geopolitik	Rivalitas negara besar, konflik kawasan, sengketa laut, keamanan jalur pelayaran
Strategi Pertahanan Laut	Modernisasi alutsista, Maritime Domain Awareness, pengamanan ALKI/SLOC, interoperabilitas, kerja sama regional
Ketahanan Energi	Keamanan pasokan, perlindungan infrastruktur energi, diversifikasi energi, kontinuitas distribusi
Keamanan Maritim	Stabilitas laut, perlindungan wilayah, penegakan hukum, keamanan jalur perdagangan

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi ini bertujuan memperoleh konsistensi informasi, mengurangi bias interpretasi, dan memperkuat keandalan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik dan Ancamannya terhadap Ketahanan Energi Nasional dalam Perspektif Keamanan Maritim

Kawasan Indo-Pasifik telah berkembang menjadi pusat gravitasi ekonomi, politik, dan keamanan global. Pergeseran orientasi geopolitik dari kawasan Atlantik menuju Indo-Pasifik didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia, tingginya volume perdagangan internasional, serta menguatnya persaingan pengaruh antarkekuatan besar dunia (Amin & Krishnan, 2021). Dalam konteks ini, Indo-Pasifik bukan sekadar konsep geografis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, melainkan ruang strategis yang menjadi arena kompetisi militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi.

Posisi strategis kawasan ini tecermin dari tingginya aktivitas pelayaran internasional yang melintasi *Sea Lines of Communication* (SLOC), yang menjadi urat nadi perdagangan dunia karena menghubungkan pusat produksi di Asia Timur dengan pasar di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Sebagian besar perdagangan energi global, termasuk minyak mentah dan gas alam cair (*liquefied natural gas*/LNG), diangkut melalui jalur laut yang melintasi Selat

Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, dan Selat Lombok, sehingga setiap gangguan terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global maupun ketahanan energi negara-negara yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut (Mansury, 2025).



Gambar 2. Peta Sea Lines of Communication (SLOC) di Kawasan Indo-Pasifik
Sumber: Diolah Penulis, 2026



Gambar 3. Ilustrasi Dinamika Persaingan Kekuatan Maritim di Kawasan Indo-Pasifik
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Bagi Indonesia, perubahan konfigurasi geopolitik Indo-Pasifik membawa dua konsekuensi. Di satu sisi, posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan sebagai negara penghubung (*maritime nexus*) antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Octavian, 2025). Di sisi lain, posisi tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan maritim, baik yang bersumber dari konflik antarnegara maupun ancaman nontradisional seperti pembajakan, penyelundupan, terorisme maritim, dan sabotase infrastruktur energi. Dalam kerangka teori klasik geopolitik, penguasaan laut (*sea power*) ditempatkan sebagai faktor utama yang menentukan kekuatan suatu negara-negara yang mampu menguasai jalur komunikasi laut, membangun armada yang kuat, dan melindungi kepentingan ekonominya di laut akan memiliki posisi lebih unggul dalam sistem internasional (Hakiem et al., 2025).

Argumen ini tetap relevan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan laut Indonesia, mengingat sebagian besar aktivitas perdagangan dan distribusi energi nasional bergantung pada keamanan wilayah maritim.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas Indo-Pasifik adalah meningkatnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang tidak hanya menyangkut aspek militer, tetapi juga dimensi ekonomi, teknologi, energi, dan pengaruh politik di kawasan. Amerika Serikat memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan yang harus tetap terbuka, bebas, dan berdasarkan hukum internasional melalui konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), sementara Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui pembangunan kekuatan laut, modernisasi angkatan bersenjata, serta implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) yang mencakup pembangunan pelabuhan dan konektivitas maritim di berbagai negara. Persaingan kedua negara ini meningkatkan intensitas kehadiran militer di kawasan, termasuk operasi kebebasan bernavigasi (*Freedom of Navigation Operations*/FONOPs), latihan militer bersama, dan pembangunan pangkalan, yang pada gilirannya menaikkan risiko salah persepsi maupun eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas jalur pelayaran internasional (Dei, 2025).

Ketegangan tersebut juga terlihat jelas di Laut Cina Selatan, salah satu kawasan paling strategis sekaligus paling kompleks dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik, karena dilalui oleh sebagian besar perdagangan energi dunia dan diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas alam yang besar (Israr, 2022). Sengketa wilayah di kawasan ini melibatkan Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, dengan klaim sepihak Tiongkok melalui *nine-dash line* yang bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Laut Natuna Utara kerap menghadapi aktivitas kapal penjaga pantai maupun kapal penangkap ikan asing yang dikawal unsur pemerintah negara lain sebuah pola yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia tidak selalu berbentuk agresi militer terbuka, melainkan juga strategi *gray zone* yang memanfaatkan instrumen sipil maupun paramiliter untuk mencapai tujuan politik (Syofyan, 2024). Kondisi ini menuntut Indonesia memperkuat pengawasan wilayah laut, meningkatkan kehadiran TNI Angkatan Laut dan Bakamla, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah perbatasan, guna menjaga kedaulatan sekaligus melindungi potensi sumber daya energi dan aktivitas ekonomi di perairan nasional.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menguasai jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui ALKI bagian penting dari jaringan SLOC yang digunakan kapal niaga internasional, termasuk kapal pengangkut minyak mentah, LNG, dan komoditas strategis lainnya (Listiyono et al., 2021). Karena sebagian besar impor minyak mentah dan bahan bakar nasional diangkut melalui jalur laut, gangguan terhadap keamanan ALKI maupun selat-selat strategis berpotensi menaikkan biaya logistik, menghambat distribusi energi, dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai infrastruktur energi strategis di wilayah pesisir dan lepas pantai terminal LNG, kilang minyak, pelabuhan energi, jaringan pipa bawah laut, dan fasilitas eksplorasi migas yang rentan terhadap sabotase, serangan siber pada sistem kendali industri, aksi terorisme, serta bencana alam, sehingga strategi pertahanan laut tidak

dapat dipisahkan dari upaya perlindungan objek vital nasional di sektor energi (Sartono et al., 2021).

Ketahanan energi merupakan komponen strategis dalam ketahanan nasional karena berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan energi bagi seluruh sektor kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ketahanan energi diartikan sebagai kondisi terjaminnya ketersediaan energi bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya energi secara optimal, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan (Bakir & Marpaung, 2023). Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya menyangkut jumlah cadangan energi yang dimiliki suatu negara, tetapi juga kemampuan mengamankan seluruh rantai pasok energi (*energy supply chain*), mulai dari eksplorasi, produksi, distribusi, penyimpanan, hingga konsumsi. Penurunan produksi minyak bumi domestik dalam beberapa dekade terakhir menjadikan Indonesia semakin bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, sehingga ketahanan energi nasional makin rentan terhadap fluktuasi harga energi global maupun gangguan terhadap jalur distribusi internasional mengingat sebagian besar impor tersebut diangkut melalui Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, dan Selat Lombok sebelum mencapai pelabuhan utama di Indonesia (Rizaldi et al., 2022).

Ancaman tradisional terhadap ketahanan energi umumnya bersumber dari konflik antarnegara, penggunaan kekuatan militer, blokade laut, maupun sengketa wilayah yang berdampak pada kebebasan navigasi. Meningkatnya rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok telah menaikkan intensitas kehadiran militer di berbagai perairan strategis, sementara Selat Malaka salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan lebar yang relatif sempit tetap menjadi titik paling rentan, penutupan sementara jalur ini akibat konflik atau kecelakaan kapal dapat menghambat distribusi energi menuju Indonesia dan kawasan Asia Timur, menaikkan biaya logistik, memperlama waktu pengiriman, dan berpotensi menaikkan harga energi domestik (Ramadhani & Marzaman, 2024).

Di luar ancaman militer konvensional, Indonesia juga menghadapi ancaman nontradisional yang kian kompleks: pembajakan (*piracy*), perampokan bersenjata di laut, penyelundupan, terorisme maritim, kejahatan lintas negara, hingga penangkapan ikan ilegal. Ancaman ini secara tidak langsung memengaruhi keamanan jalur distribusi energi karena menaikkan risiko terhadap kapal pengangkut minyak, LNG, maupun kapal logistik lainnya, meskipun angka pembajakan di Selat Malaka menurun dalam beberapa tahun terakhir, ancaman tersebut tetap berpotensi meningkat apabila pengawasan keamanan maritim melemah (Saleh et al., 2025). Infrastruktur energi seperti kilang minyak, terminal LNG, jaringan pipa bawah laut, dan pelabuhan energi merupakan objek vital nasional yang rentan terhadap terorisme maritim, sementara perubahan iklim dan bencana alam gelombang tinggi, badai tropis, gempa bumi, dan tsunami turut berpotensi merusak infrastruktur energi lepas pantai maupun pelabuhan sehingga menghambat distribusi energi nasional.

Perkembangan lingkungan strategis juga menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim semakin banyak dilakukan melalui pendekatan *gray zone* dan *hybrid warfare* strategi yang berada di antara kondisi damai dan perang terbuka sehingga sulit dikategorikan sebagai agresi militer secara langsung. Karakteristik ancaman ini mencakup penggunaan kapal penjaga pantai, kapal nelayan yang didukung negara (*maritime militia*),

operasi informasi, tekanan diplomatik, serangan siber, serta aktivitas ekonomi yang memperkuat klaim suatu negara terhadap wilayah tertentu. Indonesia menghadapi bentuk ancaman ini terutama di Laut Natuna Utara, kehadiran kapal asing yang memasuki ZEE Indonesia dengan pengawalan kapal penjaga pantai mencerminkan penggunaan strategi *gray zone* untuk menguji respons pemerintah, yang meskipun tidak berkembang menjadi konflik bersenjata dapat mengganggu eksplorasi migas, menghambat investasi sektor energi, dan menimbulkan ketidakpastian keamanan (Putra & Fitriliani, 2025). Digitalisasi sistem pengelolaan energi turut memperluas permukaan ancaman siber, karena infrastruktur strategis seperti kilang minyak, terminal LNG, pembangkit listrik, dan jaringan distribusi kini bergantung pada sistem teknologi informasi yang, bila diserang, dapat mengakibatkan gangguan operasional, kerusakan fasilitas, bahkan penghentian pasokan energi secara nasional. Oleh sebab itu, strategi pertahanan laut pada era modern perlu diintegrasikan dengan pertahanan siber dan perlindungan infrastruktur kritis nasional.

Secara keseluruhan, ancaman terhadap keamanan maritim memiliki hubungan langsung dengan tingkat ketahanan energi nasional. Gangguan terhadap jalur pelayaran internasional dapat menghambat impor minyak mentah, LPG, dan komoditas energi lainnya, sekaligus menaikkan biaya asuransi kapal, biaya pengangkutan, dan biaya logistik yang pada akhirnya memengaruhi harga energi domestik. Kerusakan pada objek vital nasional terminal LNG, kilang minyak, maupun jaringan pipa bawah laut dapat menghambat pasokan energi bagi sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, yang dalam jangka panjang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan daya saing nasional. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan energi tidak semata bergantung pada besarnya cadangan energi yang dimiliki Indonesia, melainkan juga pada kemampuan negara menjamin keamanan seluruh rantai pasok energi, sehingga strategi pertahanan laut perlu dipandang sebagai instrumen strategis untuk melindungi kepentingan energi nasional. Ringkasan sepuluh jenis ancaman utama beserta tingkat risiko dan strategi mitigasinya disajikan pada Tabel 2.

Table 2 Ancaman terhadap Ketahanan Energi Nasional dalam Perspektif Keamanan Maritim

No	Jenis Ancaman	Bentuk Ancaman	Dampak terhadap Ketahanan Energi	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Konflik Geopolitik	Rivalitas negara besar di Indo-Pasifik	Gangguan stabilitas kawasan dan jalur distribusi energi	Sangat Tinggi	Diplomasi pertahanan, penguatan deterrence TNI AL, kerja sama regional
2	Sengketa Laut	Konflik Laut Cina Selatan dan tekanan di ZEE	Menghambat eksplorasi migas dan aktivitas pelayaran	Tinggi	Penguatan patroli laut, diplomasi maritim, penegakan UNCLOS 1982
3	Gangguan SLOC	Penutupan atau gangguan jalur pelayaran strategis	Terhambatnya impor minyak mentah dan LNG	Sangat Tinggi	Pengamanan ALKI, patroli laut, diversifikasi jalur distribusi
4	Pembajakan (Piracy)	Perompakan kapal tanker dan kapal logistik	Keterlambatan distribusi energi dan kenaikan biaya logistik	Tinggi	Patroli bersama, MDA, kerja sama keamanan regional
5	Terorisme Maritim	Sabotase kapal tanker, pelabuhan, terminal LNG	Kerusakan fasilitas energi dan gangguan pasokan	Tinggi	Pengamanan objek vital nasional dan peningkatan intelijen
6	Illegal Fishing dan Kejahatan Lintas Negara	Aktivitas ilegal di wilayah laut	Menurunkan efektivitas pengawasan wilayah maritim	Sedang	Operasi gabungan TNI AL, Bakamla, Polair, dan KKP

7	Ancaman Siber	Serangan terhadap sistem kendali kilang, terminal LNG, pelabuhan	Gangguan distribusi dan produksi energi	Sangat Tinggi	Cyber defense, security operation center, perlindungan infrastruktur kritis
8	Sabotase Infrastruktur	Serangan terhadap pipa bawah laut, kabel komunikasi, platform migas	Gangguan produksi dan distribusi energi	Sangat Tinggi	Sistem keamanan berlapis (multi-layer security) dan patroli rutin
9	Bencana Alam	Gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem	Kerusakan pelabuhan, terminal LNG, jaringan pipa	Tinggi	Disaster recovery plan dan infrastruktur tangguh
10	Hybrid Warfare	Coast guard asing, maritime militia, operasi informasi	Gangguan operasi migas dan ketidakpastian investasi	Sangat Tinggi	Maritime Domain Awareness, diplomasi, interoperabilitas antarinstansi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

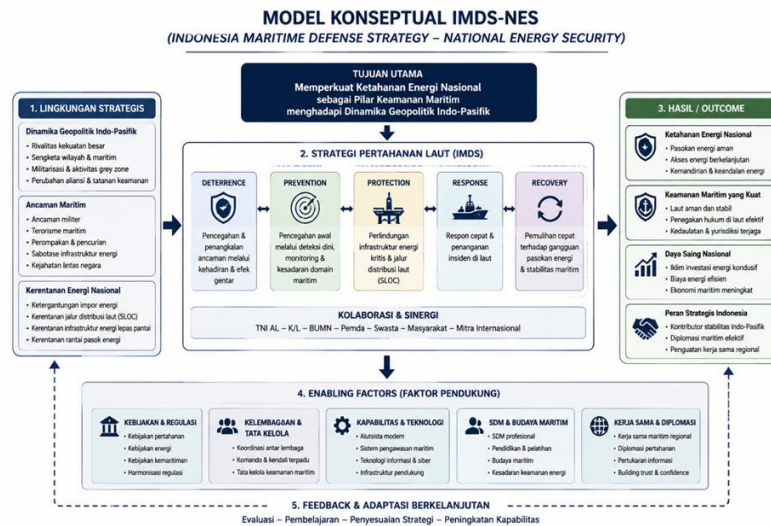
Strategi Pertahanan Laut Terintegrasi dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

Ancaman terhadap kepentingan maritim Indo-Pasifik tidak lagi terbatas pada konflik militer konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ancaman non-konvensional dan *gray zone*. Karena itu, strategi pertahanan laut Indonesia perlu diarahkan pada pembangunan kekuatan yang mampu menciptakan daya tangkal (*deterrence*) sekaligus menjamin keamanan jalur komunikasi laut, perlindungan objek vital nasional, dan keberlangsungan distribusi energi. Dalam perspektif *sea power*, kekuatan laut suatu negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan jalur pelayaran strategis (*command of the sea*), keberadaan pangkalan logistik, industri pertahanan maritim, serta dukungan kebijakan nasional (Sekar Arum et al., 2024). Pandangan ini dilengkapi oleh perspektif strategi maritim yang menempatkan pengendalian laut sebagai sarana untuk melindungi jalur perdagangan, bukan semata untuk pertempuran laut, serta oleh kajian kontemporer yang menekankan bahwa kekuatan laut abad ke-21 mensyaratkan keterpaduan antara kapabilitas militer, kelembagaan, dan diplomasi maritim. Dengan demikian, modernisasi pertahanan laut Indonesia perlu dipahami sebagai investasi strategis untuk menjaga kepentingan nasional di laut, termasuk ketahanan energi.

Indonesia telah memodernisasi alutsista melalui pengadaan kapal perang, kapal selam, pesawat patroli maritim, radar pantai, serta sistem rudal pertahanan pantai, sejalan dengan arah pembangunan kekuatan dalam Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe. Namun demikian, modernisasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala: keterbatasan anggaran, ketergantungan pada teknologi luar negeri, belum meratanya penyebaran kekuatan di wilayah timur Indonesia, serta kebutuhan peningkatan kesiapan operasional armada¹. Mengingat sebagian besar objek vital nasional kilang minyak, terminal LNG, jaringan pipa bawah laut, pelabuhan energi, dan fasilitas eksplorasi migas berada di wilayah pesisir dan lepas pantai, pembangunan kekuatan laut perlu diarahkan bukan hanya pada peperangan (*warfighting*), melainkan juga pada perlindungan infrastruktur strategis nasional. Selain modernisasi platform, peningkatan kualitas sumber daya manusia penguasaan teknologi maritim, kecerdasan buatan, sistem nirawak, analisis data intelijen, dan kemampuan operasi gabungan menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika ancaman maritim modern (Basundoro & Sanjaya, 2025).

Kemampuan tersebut perlu ditopang oleh *Maritime Domain Awareness* (MDA), yakni kemampuan negara memperoleh, mengintegrasikan, menganalisis, dan mendistribusikan

informasi mengenai seluruh aktivitas di wilayah laut secara *real-time*. MDA menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis karena memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan tiga ALKI sebagai jalur utama pelayaran internasional menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan maritim, mengingat masih terbatasnya cakupan radar pantai, integrasi sistem informasi antarlembaga, serta kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan dan laut lepas (Fita, 2025).



Gambar 4. Komponen Integrasi Maritime Domain Awareness (MDA)
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Penguatan MDA memerlukan integrasi berbagai sumber informasi sistem radar pantai, satelit penginderaan jauh, *Automatic Identification System* (AIS), *Long Range Identification and Tracking* (LRIT), pesawat patroli maritim, kapal patroli, kendaraan udara nirawak, dan sistem intelijen maritim yang dihubungkan dalam satu *National Maritime Information System* yang dapat diakses secara terpadu oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, dan Bea Cukai. Integrasi ini memberikan sejumlah manfaat strategis: mempercepat deteksi dini dan respons terhadap pelanggaran wilayah, meningkatkan efektivitas patroli laut, melindungi jalur distribusi energi, serta menurunkan risiko penyelundupan dan kejahatan lintas negara. Dengan demikian, investasi pada sistem informasi maritim memiliki nilai strategis yang setara dengan investasi pada platform militer (Reggiannini et al., 2024).

Keamanan *Sea Lines of Communication* (SLOC) merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengingat jalur ini tidak hanya dilalui kapal dagang internasional tetapi juga menjadi rute utama distribusi minyak mentah, LNG, batu bara, dan komoditas strategis lainnya menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Ketergantungan Indonesia terhadap transportasi laut menyebabkan gangguan pada SLOC akibat konflik, pembajakan, kecelakaan kapal, atau sabotase berdampak langsung pada ketahanan energi nasional melalui terhambatnya distribusi dan naiknya biaya logistik. Strategi pengamanan SLOC karenanya perlu ditempuh melalui peningkatan patroli laut berkelanjutan, penguatan pangkalan TNI AL di wilayah strategis, pembangunan sistem peringatan dini, optimalisasi operasi gabungan bersama Badan Keamanan Laut, serta peningkatan kerja sama keamanan

dengan negara-negara tetangga dipadukan dengan pembangunan pelabuhan militer, fasilitas logistik, pusat komando maritim, dan jaringan komunikasi yang mendukung operasi jangka Panjang (Suharyo & Bastari, 2021).

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa pembahasan pertahanan laut di Indonesia masih cenderung berorientasi pada perlindungan wilayah kedaulatan, sementara perlindungan infrastruktur energi platform minyak lepas pantai, terminal LNG, kilang minyak, pelabuhan energi, jaringan pipa bawah laut, kabel komunikasi bawah laut, dan pembangkit listrik pesisir belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Objek-objek tersebut sangat rentan terhadap sabotase, terorisme, serangan siber, kecelakaan pelayaran, maupun bencana alam, sehingga diperlukan pendekatan *multi-layer security* yang mencakup perlindungan fisik melalui patroli laut, sistem pengawasan elektronik, pertahanan siber, sistem tanggap darurat, koordinasi lintas kementerian, dan latihan bersama secara berkala (Labandi & Haris, 2023). Dengan pendekatan ini, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kemampuan negara melindungi seluruh rantai distribusi energi.

Hasil analisis pada kedua subbab sebelumnya menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional memiliki hubungan erat dengan keamanan maritim. Dinamika geopolitik Indo-Pasifik rivalitas antarnegara besar, sengketa wilayah laut, ancaman terhadap SLOC, serta berkembangnya ancaman non-tradisional telah menaikkan risiko terhadap keberlanjutan rantai pasok energi Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pertahanan laut tidak lagi hanya berfungsi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi kepentingan nasional yang mencakup aspek ekonomi, energi, dan stabilitas kawasan. Tantangan utama Indonesia bukan semata keterbatasan kekuatan militer, melainkan belum optimalnya integrasi antara kebijakan pertahanan, keamanan maritim, pengelolaan energi, dan koordinasi antarlembaga; fragmentasi kewenangan dalam pengelolaan ruang laut menyebabkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap ancaman belum maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model *Integrated Maritime Defense Strategy for National Energy Security* (IMDS-NES) sebagai kerangka konseptual untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui strategi pertahanan laut. Model ini terdiri atas lima pilar yang saling berkaitan:

- 1) Penguatan Kapabilitas Pertahanan Laut : pembangunan kemampuan pertahanan laut melalui modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut, penguatan pangkalan strategis, serta pengembangan industri pertahanan maritim nasional sebagai fondasi daya tangkal terhadap ancaman yang mengganggu jalur pelayaran dan objek vital energi.
- 2) *Maritime Domain Awareness* (MDA) : sistem kesadaran domain maritim yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi aktivitas laut melalui radar pantai, satelit, AIS, LRIT, pesawat patroli maritim, serta wahana nirawak, untuk mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
- 3) Perlindungan Infrastruktur Energi : pengamanan kilang minyak, terminal LNG, jaringan pipa bawah laut, kabel komunikasi, dan fasilitas eksplorasi migas melalui patroli rutin, pengawasan elektronik, perlindungan siber, serta mekanisme tanggap darurat yang terintegrasi.

- 4) Sinergi Antarinstansi : koordinasi antara TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Badan Siber dan Sandi Negara, serta pemerintah daerah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat pertukaran informasi.
- 5) Kerja Sama Regional : kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik melalui forum seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus* (ADMM-Plus), *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan mekanisme patroli terkoordinasi untuk menghadapi ancaman lintas negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model IMDS-NES yang menghubungkan secara sistematis dinamika geopolitik Indo-Pasifik, strategi pertahanan laut, keamanan maritim, dan ketahanan energi nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas pertahanan lautⁱⁱ atau ketahanan energiⁱⁱⁱ secara terpisah, model ini menawarkan pendekatan integratif yang memandang keamanan energi sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi pertahanan maritim, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas pertahanan laut tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari kapasitas negara membangun kesadaran domain maritim, melindungi infrastruktur energi, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan kerja sama regional.

Berdasarkan model yang diusulkan, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah:

- a) Menyusun kebijakan nasional yang mengintegrasikan pertahanan, keamanan maritim, dan ketahanan energi dalam satu kerangka strategis.
- b) Mempercepat modernisasi kekuatan TNI Angkatan Laut dengan prioritas pada kemampuan pengawasan, patroli, dan perlindungan objek vital.
- c) Mengembangkan sistem Maritime Domain Awareness nasional yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital.
- d) Menetapkan infrastruktur energi maritim sebagai prioritas dalam sistem perlindungan objek vital nasional.
- e) Meningkatkan interoperabilitas antarlembaga melalui pusat komando maritim terpadu.
- f) Memperluas kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis strategi pertahanan laut dalam memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar keamanan maritim di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, dengan lima simpulan utama. Pertama, dinamika geopolitik Indo-Pasifik meningkatkan kompleksitas ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia, mulai dari rivalitas antarkekuatan besar, sengketa Laut Cina Selatan, meningkatnya aktivitas militer, hingga ancaman non-tradisional dan *gray zone*, sehingga ancaman kini tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional tetapi juga menyasar jalur pelayaran, infrastruktur, dan rantai pasok energi nasional. Kedua, ketahanan energi nasional dan keamanan maritim saling terkait erat, karena sebagai negara kepulauan yang bergantung pada transportasi laut, Indonesia rentan terhadap gangguan pada SLOC, ALKI, dan objek vital energi di wilayah pesisir/lepas pantai yang dapat menghambat distribusi energi, menaikkan biaya logistik, serta memengaruhi

stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Ketiga, strategi pertahanan laut yang efektif harus komprehensif dan terintegrasi, memadukan modernisasi TNI Angkatan Laut, penguatan Maritime Domain Awareness, pengamanan ALKI/SLOC, perlindungan infrastruktur energi, interoperabilitas antarlembaga, dan kerja sama regional guna memperkuat deteksi dini, pencegahan, respons, dan pemulihan terhadap ancaman. Keempat, penelitian ini menghasilkan model Integrated Maritime Defense Strategy for National Energy Security (IMDS-NES) sebagai kebaruan, yang menghubungkan geopolitik, keamanan maritim, dan ketahanan energi melalui lima pilar kapabilitas pertahanan laut, MDA, perlindungan infrastruktur energi, sinergi antarlembaga, dan kerja sama regional serta menegaskan bahwa ketahanan energi bergantung tidak hanya pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada keamanan ruang maritim sebagai jalur distribusi dan lokasi infrastruktur energi. Kelima, pembangunan pertahanan laut Indonesia perlu diarahkan pada konsep Integrated Maritime Security yang memadukan pertahanan negara, penegakan hukum laut, keamanan energi, perlindungan infrastruktur kritis, dan diplomasi pertahanan, guna memperkuat daya tangkal, stabilitas kawasan, dan kepentingan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. R., & Krishnan, T. (2021). The Rise of Indo- Pacific: Responses of the Quad and ASEAN. *Electronic Journal of Social and Strategic Studies*, 02(02), 211–228. <https://doi.org/10.47362/ejsss.2021.2211>
- Bakir, H., & Marpaung, C. (2023, December 20). *Renewal of Energy Law (Law No. 30 of 2007) for Indonesia in the Energy Transition Era (Transition from Fossil Energy to Renewable Energy)*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341808>
- Basundoro, A. F., & Sanjaya, T. (2025). DOES IT MAKE SENSE? ANALYSING INDONESIA'S NAVAL PROCUREMENT UNDER PRESIDENT JOKO WIDODO. *Asian Affairs*, 56(2), 372–392. <https://doi.org/10.1080/03068374.2025.2500635>
- Dao, Y. (2024). Defense Strategies in Safeguarding Maritime Security in Indonesia's Outmost Small Islands. *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2(4), 212–225. <https://journal.idscipub.com/politeia>
- Dei, M. (2025). THE INDO-PACIFIC AS A STRATEGIC ARENA: EVOLVING SECURITY ALLIANCES AND DEEPENING POWER RIVALRIES. *Politics & Security*, 13(3), 70–81. <https://doi.org/10.54658/ps.28153324.2025.13.3.pp.70-81>
- Fita, G. A. (2025). Enhancing Maritime Security through Strategic Intelligence: The Relevance of the Global Maritime Axis to Indonesia's National Resilience. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), 118–128. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i1.40>
- Hakim, F. N., Mayasari, M., & Abidin, Z. (2025). Indonesia's Maritime Diplomacy and Regional Security in the Indo-Pacific. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5(1), 50–64. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4309>
- Israr, H. (2022). South China Sea Conflict; A Territorial Dispute. *Journal of Nautical Eye & Strategic Studies | South China Sea Conflict*, 2.
- Kuntjoro, Y. D., Khotimah, K., & Agustiani, R. (2021). Indonesia energy security concept to improve sustainability of new and renewable energy utilization in Indonesia with quintuple

- helix model: 4A+1S for national defense. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 753(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/753/1/012045>
- Labandi, L., & Haris, M. (2023). Development of Indonesian Maritime Sovereignty Culture Through Indonesian Maritime Policy with Indonesian Maritime Defense Strategy. *The Innovation of Social Studies Journal*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.20527/issj.v5i1.8489>
- Listiyono, Y., Pramono, B., Y. Prakoso, L., Prihantoro, K., & Sianturi, D. (2021). MARINE DEFENSE STRATEGY IN SECURING INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA Lanes (ALKI) TO REALIZE MARITIME SAFETY AND MAINTAIN INDONESIAN SOILITY. *International Journal of Education and Social Science Research*, 04(03), 224–237. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2021.4313>
- Mansury, P. N. (2025). Opening Speech: STRENGTHENING MARITIME DIPLOMACY AND REGIONAL RESILIENCE IN THE INDO-PACIFIC. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 8(1), 8–11. <https://doi.org/10.55960/jgf.v8i1.266>
- Octavian, A. (2025). PROJECTING FUTURE CHALLENGES IN MARITIME SECURITY. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 8(1), 86–92. <https://doi.org/10.55960/jgf.v8i1.262>
- Paszak, P. (2021). The Malacca Strait, the South China Sea and the Sino-American Competition in the Indo-Pacific. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8(2).
- Putra, D. G., & Fitriliani, Y. (2025). PENEGAKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA TERKAIT ANCAMAN OPERASI MILITARY GREY ZONE OPERATION OLEH CINA DI LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.25105/yb716q60>
- Ramadhani, R., & Marzaman, A. (2024). MARITIME STABILITY IN THE STRAIT OF HORMUZ: CHALLENGES, GLOBAL IMPACTS, AND MULTILATERAL DIPLOMACY. *HYPOTHESIS: Multidisciplinary Journal Of Social Sciences*, 3(02), 81–96. <https://doi.org/10.62668/hypothesis.v3i02.1293>
- Reggiannini, M., Salerno, E., Bacciu, C., D'Errico, A., Lo Duca, A., Marchetti, A., Martinelli, M., Mercurio, C., Mistretta, A., Righi, M., Tampucci, M., & Paola, C. Di. (2024). Remote Sensing for Maritime Traffic Understanding. *Remote Sensing*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/rs16030557>
- Rizaldi, S., Suhartono, S., Hadi, S., & Michael, T. (2022). Role of head of states at G20 High Level Conference in utilizing environmental of sustainable development on electricity in Indonesia. *Technium*, 38, 197–203. www.techniumscience.com
- Saleh, A. J. M., Widagdo, S., & Puspitawati, D. (2025). Enforcement of Sovereignty and Legal Measures Against Acts of Piracy at Sea Considered as a Form of Maritime Terrorism in Indonesian Waters. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(05). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i5-40>
- Sarjito, A. (2025). Evaluating Indonesia's National Defense Policy in Shaping an Effective Area Denial Strategy. *Journal of Political Issues*, 6(2), 124–134. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.216>
- Sartono, Pramono, B., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). THE INDONESIAN GOVERNMENT AUTHORITY IN SECURING INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA LANES (ASLs/ALKI). *International Journal of Education and Social Science Research*, 04(02), 217–234. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2021.4218>

- Sekar Arum, D., Mahhroza, J., Yudho Prakoso, L., & Patmi, S. (2024). Sea Power as National Defence: Has Indonesia implemented it? In *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)* E-ISSN (Vol. 3, Number 6). <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Simatupang, H. Y., Romulus Panggabean, M., & Oktaviani, J. (2023). PROGRESS AND PROSPECTS: PRESIDENT JOKOWI'S MARITIME DIPLOMACY AND GLOBAL MARITIME FULCRUM. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2).
- Sopali, M. I. (2025). The Role of Energy Security In Supporting Indonesia's National Security: A Strategic Approach. In *Jurnal Indonesia Sosial Sains* (Vol. 6, Number 5). <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Suharyo, O. S., & Bastari, A. (2021). Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia. *Rekayasa*, 14(3), 443–449. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.13087>
- Syofyan, Y. (2024). Country Boundary Agreement as An Effort to Resolve The South China Sea Dispute. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(1), 54–61. <https://doi.org/10.60034/fjebsw40>
-